

PENGARUH PDRB PER KAPITA, PENGANGGURAN, KELUHAN KESEHATAN DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

Ni Wayan Meisya Cempaka Puteri¹

Ni Nyoman Reni Suasih²

^{1,2}Fakultas EkonomidanBisnisUniversitasUdayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan selalu diupayakan untuk diminimalkan, bahkan jika memungkinkan untuk dihilangkan. Namun, pada kenyataannya, kemiskinan masih tetap menjadi bagian integral dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Rumitnya isu kemiskinan terus menjadi fokus yang diulang pada setiap fase perkembangan di berbagai wilayah. Perlu diketahui Provinsi Bali mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat, akan tetapi tingkat pengangguran dan jumlah penduduk yang hidup dalam kondisi miskin tetap tinggi. Permasalahan kemiskinan tetap menjadi fokus utama yang memerlukan perhatian tambahan. Untuk itu diperlukannya kebijakan dari pemerintah untuk menangani masalah tersebut khususnya di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Studi ini memiliki tujuan menganalisis pdrb per kapita, pengangguran, keluhan kesehatan dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan rentang waktu 10 tahun yaitu 2012-2021. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali yang mencakup 9 Kabupaten/Kota. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa PDRB per kapita tidak berpengaruh negatif Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Sementara pengangguran, keluhan kesehatan, dan pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Kata kunci: Kemiskinan, PDRB Per Kapita, Pengangguran, Keluhan Kesehatan, Pertumbuhan Penduduk

ABSTRACT

Poverty is a problem faced by every country, especially in developing countries like Indonesia. Efforts are always made to minimize poverty, and even eliminate it if possible. However, in reality, poverty continues to remain an integral part of various aspects of human life. The complexity of the poverty issue continues to be a recurring focus in every developmental phase across different regions. It's worth noting that Bali Province has experienced rapid economic

growth, but the unemployment rate and the number of people living in poverty remain high. Addressing the issue of poverty remains a primary focus that requires additional attention. Therefore, government policies are needed to address this problem, particularly in the districts and cities of Bali Province. This study aims to analyze the per capita Gross Regional Domestic Product (GRDP), unemployment, health complaints, and population numbers in relation to poverty in the districts and cities of Bali Province. The research employs secondary data spanning a period of 10 years, from 2012 to 2021. The study is conducted in Bali Province, encompassing 9 districts and cities. The analytical technique used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that per capita GRDP does not have a negative impact on poverty in the districts and cities of Bali Province. Meanwhile, unemployment, health complaints, and population growth have a positive impact on poverty in the districts and cities of Bali Province.

Keywords: *Poverty, GRDP Per Capita, Unemployment, Health Complaints, Population Growth*

PENDAHULUAN

Fenomena kemiskinan merupakan isu yang dihadapi oleh semua negara, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan senantiasa menjadi target untuk dikurangi secara signifikan, bahkan dalam situasi terbaik, dimungkinkan untuk dihapuskan. Namun, pada kenyataannya, kemiskinan masih terus melekat dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Karena kompleksitasnya, isu kemiskinan tetap menjadi perhatian utama dalam setiap tahap pembangunan yang terjadi di berbagai wilayah. Seperti yang diungkapkan oleh Kuncoro (1997), kemiskinan merujuk pada ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup dasar. Standar ini mencakup kebutuhan-kebutuhan pokok seperti pakaian, tempat tinggal, makanan, kesehatan dan pendidikan. Menghadapi tantangan kemiskinan adalah upaya untuk mendorong transformasi ekonomi serta menciptakan peluang lebih besar dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial. Penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan terpadu yang sesuai dengan prioritas dan kondisi setiap wilayah, selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang diarahkan melalui strategi jangka panjang dan pendek. Oleh karena itu, salah satu tanda keberhasilan utama pembangunan nasional dapat diukur dari laju penurunan jumlah penduduk yang hidup dalam kondisi miskin.

Kemiskinan di Indonesia tidak terdistribusi secara seragam, melainkan beberapa provinsi memiliki tingkat kemiskinan yang rendah sementara beberapa provinsi lainnya memiliki tingkat

kemiskinan yang tinggi. Provinsi Bali merupakan salah satu contoh daerah yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. Pada masa kini, tingkat kemiskinan tak hanya dievaluasi berdasarkan dimensi ekonomi yang rendah, melainkan juga dipertimbangkan dari berbagai sudut pandang yang beraneka ragam. Tergantung pada sudut pandang yang digunakan, definisi kemiskinan juga mengalami pergeseran. Secara umum, kemiskinan dalam dimensi yang lebih luas adalah ketidakmampuan ekonomi yang melampaui sekadar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, melainkan juga mencakup ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pakaian, makanan, dan tempat tinggal (Alit dan Sudiana, 2013).

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa) Periode 2012-2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa)									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jembrana	15.30	14.92	15.80	15.83	14.53	14.78	14.35	13.55	12.60	14.24
Tabanan	21.00	22.49	24.40	24.05	21.90	21.66	19.77	18.74	19.11	23.11
Badung	12.51	14.55	15.40	14.40	12.91	13.16	12.97	11.89	13.75	18.52
Gianyar	22.63	20.80	22.50	22.89	22.13	22.42	21.26	19.85	21.01	25.36
Klungkung	9.30	12.21	12.30	12.11	11.21	11.15	10.43	9.66	8.76	10.19
Bangli	9.90	12.00	13.00	12.74	11.66	11.76	11.05	10.08	9.56	11.68
Karangasem	22.68	27.85	29.70	30.33	27.12	27.02	26.02	25.99	24.69	28.52
Buleleng	32.96	40.32	43.70	43.43	37.55	37.48	35.20	34.26	35.25	40.92
Denpasar	12.66	17.63	19.20	20.94	19.17	20.70	20.72	19.83	20.48	29.41
Provinsi Bali	158.95	182.77	196.00	196.71	178.18	180.13	171.76	163.85	165.19	201.97

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

Sejak tahun 2012, pemerintah Provinsi Bali telah memulai upaya pengembangan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara yang juga dikenal dengan sebutan Gerbang Sadu Mandara (GSM). Program yang dibuat tersebut berfungsi sebagai platform bagi komunitas di pedesaan untuk aktif berperan serta dalam pembangunan diri dan lingkungannya dengan pendekatan mandiri dan berpartisipasi. Gerbang Sadu Mandara (GSM) adalah inisiatif atau langkah yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran, sekaligus mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah di Provinsi Bali. Di samping inisiatif tersebut, pemerintah Provinsi Bali juga telah melaksanakan beberapa langkah

penanggulangan kemiskinan, seperti program perbaikan rumah, kelompok tani, pendidikan pertanian, kelompok pengendalian hama, dan bantuan ekonomi desa pakraman.

Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Bali belum berhasil dalam menanggulangi kemiskinan. Penduduk miskin di Provinsi Bali pada tahun 2012-2015 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 meningkat dari 158,95 ribu jiwa menjadi 196,71 ribu jiwa pada tahun 2015. Lalu pada tahun 2016-2019 jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali secara perlahan mengalami penurunan yaitu dari 178,18 ribu jiwa menurun menjadi 163,85 ribu jiwa pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020-2021 Provinsi Bali dilanda pandemi Covid-19 sehingga dampak dari adanya pandemi tersebut menyebabkan kemiskinan di Provinsi Bali kembali mengalami peningkatan. Kabupaten Buleleng menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Bali pada setiap tahunnya. Tidak hanya Kabupaten Buleleng, tetapi Kabupaten Karangasem juga menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tertinggi kedua di Provinsi Bali. Jumlah penduduk miskin terendah di Provinsi Bali tercatat berada di Kabupaten Klungkung yakni sebesar 8,76 ribu jiwa pada tahun 2020.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penurunan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi saja tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi kemiskinan, tetapi pertumbuhan tersebut merupakan prasyarat yang diperlukan, seperti yang dikemukakan oleh Sri Budhi (2013). Kemajuan dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kontribusi pemerintah melalui langkah-langkah yang diambil untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang disoroti oleh Edogbanya, dkk (2013). Dukungan keuangan yang disalurkan oleh pemerintah dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan, sehingga peran penting pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi sangatlah signifikan, sebagaimana diungkapkan oleh Dalamagas, dkk (2010). Faktor yang memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan suatu masyarakat dan prestasi dalam pembangunan di suatu daerah, dari aspek ekonomi, dapat diilustrasikan dengan contoh peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut, sesuai dengan penelitian dari Suidiana (2015). Tanda-tanda perkembangan ekonomi bisa diperhatikan melalui salah satu parameter, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),

karena PDRB mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi yang tercapai dalam suatu periode, seperti yang dijelaskan oleh Wijayanti (2014). Myanti (2013) menjelaskan bahwa PDRB berperan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi performa ekonomi sebuah wilayah dari waktu ke waktu, sehingga semakin tinggi angka PDRB suatu daerah, maka diperkirakan akan ada penurunan kecenderungan kemiskinan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan PDRB per kapita di Provinsi Bali selama sepuluh tahun terakhir yaitu pada tahun 2012-2019 secara konsisten terus mengalami peningkatan. Sementara itu, pada tahun 2020 PDRB per kapita Provinsi Bali mengalami penurunan yaitu dari 34,22 juta rupiah menjadi 32,98 juta rupiah pada tahun 2021 akibat dari dampak pandemi Covid-19. Capaian tertinggi tercatat pada Kabupaten Badung dengan jumlah PDRB per kapita tertinggi di Provinsi Bali pada setiap tahunnya. Tidak hanya Kabupaten Badung, tetapi Kota Denpasar juga menjadi Kota dengan jumlah PDRB per kapita tertinggi kedua di Provinsi Bali. Jumlah PDRB per kapita terendah di Provinsi Bali tercatat berada di Kabupaten Bangli.

Faktor lain yang memiliki dampak terhadap tingkat kemiskinan adalah ketidaktersediaan pekerjaan, karena salah satu elemen yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai puncaknya saat situasi pemanfaatan tenaga kerja penuh (*full employment*) tercapai. Pengangguran merupakan kondisi seseorang tergolong angkatan kerja dan yang menginginkan pekerjaan tetapi belum memperoleh pekerjaan tersebut (Sukirno, 1997). Keterhubungan antara pengangguran dan tingkat kemiskinan sangat erat, tercermin dalam aspek-aspek kualitatif dan kuantitatif yang beragam seperti pendapatan yang minim, kondisi perumahan yang kurang layak, kesehatan yang buruk, akses pendidikan yang terbatas atau bahkan tidak ada, angka kematian bayi yang tinggi, usia harapan hidup yang singkat, dan peluang pekerjaan yang terbatas.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (BPS) jika diperbandingkan antara daerah kabupaten dengan kota, tingkat pengangguran di kota relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah kabupaten. Faktor ini terjadi karena wilayah perkotaan tidak dapat menghindari dampak dari arus urbanisasi (migrasi), yang mengakibatkan pertumbuhan populasi yang pesat di perkotaan namun tidak diimbangi oleh ketersediaan

pekerjaan yang memadai, sehingga konsekuensinya adalah terjadi tingkat pengangguran yang tinggi.

Selain PDRB per kapita dan tingkat pengangguran, terdapat faktor lainnya yang mempengaruhi kemiskinan yaitu masalah kesehatan. Kesehatan menjadi ukuran kesejahteraan rakyat yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat berhubungan dengan kualitas kehidupannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nasikun pada tahun 1987, seperti yang dijelaskan oleh Sairin et al. (1992), ditemukan bahwa kesehatan dan gizi pekerja memiliki dampak terhadap produktivitas masyarakat. Dalam hal ini tercermin daya tahan tubuhnya untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (BPS) pada tahun 2012 jumlah penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan tertinggi adalah di Kabupaten Buleleng yaitu sebanyak 51.05 persen, disusul oleh Kabupaten Karangasem di tempat kedua sebanyak 45.47 persen. Sebaliknya, yang paling rendah adalah Kabupaten Badung yaitu sebanyak 21.03 persen. Selanjutnya, jika diperhatikan keadaan tahun 2021 tampak bahwa jumlah penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan tertinggi adalah di Kota Denpasar yang mencapai 44.10 persen. Posisi kedua diduduki oleh Kabupaten Karangasem dengan jumlah penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan mencapai 23.97 persen. Sementara itu, Kabupaten Badung merupakan Kabupaten yang jumlah penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan paling rendah pada tahun 2021 yaitu sebanyak 11.95 persen.

Faktor lainnya yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah pertumbuhan populasi penduduk yang memiliki dampak terhadap tingkat kemiskinan. Perkembangan populasi memiliki peran sentral dalam memengaruhi jumlah individu yang hidup dalam kemiskinan. Kehadiran populasi umumnya dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan pendapatan (pendapatan per kapita) suatu negara, yang dalam garis besar mencerminkan kemajuan ekonominya (Subri, 2003: 55). Biasanya, negara yang dianggap miskin memiliki ciri-ciri seperti pendapatan per kapita yang rendah, pertumbuhan populasi yang tinggi (lebih dari 2 persen setiap tahun), sebagian besar angkatan kerja bekerja di sektor pertanian, dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit dipecahkan (Yulianto, 2018).

Menurut Nelson dan Leibstein (sebagaimana dikutip oleh Sadono Sukirno, 2000), terdapat hubungan langsung antara penambahan populasi dan tingkat kesejahteraan

masyarakat. Nelson dan Leibstein menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi yang cepat di negara-negara berkembang dapat menyebabkan kurangnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dalam jangka panjang berpotensi menurunkan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik proyeksi penduduk di Provinsi Bali pada tahun 2012-2021 mengalami fluktuasi, dimana Kota Denpasar merupakan daerah yang proyeksi penduduknya yang paling tinggi. Proyeksi penduduk paling tinggi tercatat pada tahun 2019 yaitu sebesar 957.8 ribu jiwa. Proyeksi penduduk terendah tercatat pada Kabupaten Klungkung yaitu sebanyak 172.9 ribu jiwa pada tahun 2021. Dalam hal jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan, Kabupaten Buleleng merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin paling tinggi di Provinsi Bali, mencapai 37.480 orang pada tahun 2017. Kabupaten Karangasem mengikuti dengan 27.020 orang miskin, sementara Kabupaten Gianyar, yang mencakup wilayah pariwisata Ubud, berada pada posisi berikutnya dengan 22.420 orang miskin. Pada tahun 2014, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buleleng bahkan mencapai 43.700 orang, hal ini tentunya harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten/Kota dan juga Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam penelitian ini dikemukakan hipotesis sebagai berikut, PDRB Per Kapita, berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Pengangguran, Keluhan Kesehatan, dan Pertumbuhan Penduduk berpengaruh positif terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan persamaan model awal maka dapat diekspresikan dalam persamaan sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X4	0.022784	0.003419	6.662942	0.0000
X3	0.496540	0.081712	6.076682	0.0000
X2	1.184156	0.373177	3.173171	0.0021
X1	-0.135100	0.086786	-1.556711	0.1233
C	-4.886739	4.246534	-1.150759	0.2531

Sumber: Data diolah dengan Eviews, 2023

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh model regresi sebagai berikut:

Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali = $-4.886739 - 0.135100 \text{ PDRB Per Kapita} + 1.184156 \text{ Pengangguran} + 0.496540 \text{ Kesehatan} + 0.022784 \text{ Pertumbuhan Penduduk}$

Dari persamaan diatas dapat disimpulkan beberapa hal, diantaranya:

- a) Konstanta sebesar -4.886739 artinya walaupun variabel yakni PDRB per kapita, pengangguran, kesehatan, dan pertumbuhan penduduk bernilai 0, nilai variabel kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali tetap, yaitu sebesar -4.886739 .
- b) Koefisien PDRB per kapita negatif, yaitu sebesar -0.135100 artinya jika variabel PDRB per kapita mengalami kenaikan sebesar 1 poin, maka variabel kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali akan turun sebesar -0.135100 .
- c) Koefisien Pengangguran positif, yaitu sebesar 1.184156 artinya jika variabel pengangguran mengalami kenaikan sebesar 1 poin, maka variabel kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali akan naik sebesar 1.184156 .
- d) Koefisien Kesehatan positif, yaitu sebesar 0.496540 artinya jika variabel kesehatan mengalami kenaikan sebesar 1 poin, maka variabel kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali akan naik sebesar 0.496540 .

e) Koefisien pertumbuhan penduduk positif, yaitu sebesar 0.022784 artinya jika variabel pertumbuhan penduduk mengalami kenaikan sebesar 1 poin, maka variabel kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali akan naik sebesar 0.022784.

Tabel 3. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X4	0.022784	0.003419	6.662942	0.0000
X3	0.496540	0.081712	6.076682	0.0000
X2	1.184156	0.373177	3.173171	0.0021
X1	-0.135100	0.086786	-1.556711	0.1233
C	-4.886739	4.246534	-1.150759	0.2531

Sumber: Data diolah dengan Eviews, 2023

Pengujian parsial (uji t) digunakan untuk mengevaluasi dampak variabel independen pada variabel dependen secara terpisah. Evaluasi atas hasil regresi dilakukan melalui pengujian uji t dengan tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 5\%$.

Pengaruh PDRB Per Kapita Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

H₀ : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara PDRB per kapita terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

H_a : Ada pengaruh yang signifikan antara PDRB per kapita terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Hasil perhitungan secara parsial pengaruh PDRB per kapita terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali diperoleh koefisien regresi sebesar -0.135100. Dengan tingkat signifikansi = 0.005, diperoleh nilai t sebesar -1.556711 dan signifikansi sebesar 0.1233 (*p-value* > 0.05). Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi melebihi $\alpha = 0,05$. Karena nilai signifikansi melebihi 0,05, maka hipotesis alternatif (H_a) ditolak, dan hipotesis nol (H₀) diterima. Dapat diambil keputusan bahwa PDRB per kapita tidak berpengaruh secara signifikan kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi "PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali" ditolak.

Hasil analisis regresi yang dilakukan mengungkap bahwa variabel PDRB per kapita memiliki dampak negatif yang tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. PDRB per kapita pada suatu wilayah mencerminkan kemampuan rata-rata pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pemenuhan kebutuhan pokok ini juga menjadi indikator kesejahteraan dalam konteks pemerataan pendapatan di wilayah tersebut. Tingkat kemiskinan tidak hanya terkait dengan kapasitas pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan distribusi pendapatan di masyarakat suatu daerah (Todaro, 1997).

Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

H₀ : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

H_a : Ada pengaruh yang signifikan antara pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Hasil perhitungan secara parsial pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali diperoleh koefisien regresi sebesar 1.184156. Dengan tingkat signifikansi = 0.005, diperoleh nilai t sebesar 3.173171 dan signifikansi sebesar 0.0021 (*p-value* < 0.05). Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi lebih rendah dari $\alpha = 0,05$. Karena nilai signifikansi lebih rendah dari 0,05, maka hipotesis nol (H₀) ditolak, dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Dapat diambil keputusan bahwa pengangguran berpengaruh secara signifikan kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Koefisien regresi bernilai positif sebesar 1.184156 yang artinya pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Semakin tinggi Pengangguran, maka semakin tinggi pula Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi “pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali” diterima.

Hasil analisis regresi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Sejumlah anggota masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau hanya bekerja paruh waktu cenderung termasuk dalam kelompok masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Orang-orang dengan pendapatan stabil dari sektor pemerintah dan swasta cenderung termasuk dalam

kelas menengah atas, seperti yang dijelaskan oleh Octaviani (2001). Ketergantungan pendapatan atau upah sangat kuat di beberapa rumah tangga Indonesia. Kehilangan pekerjaan dapat mengakibatkan penurunan pendapatan, dan apabila ini terjadi, maka kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan rendah akan terdorong ke dalam kelompok masyarakat miskin, seperti yang dijelaskan oleh Marmujiono (2014). Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran, maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan.

Pengaruh Keluhan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara keluhan kesehatan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

H_a : Ada pengaruh yang signifikan antara keluhan kesehatan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Hasil perhitungan secara parsial pengaruh keluhan kesehatan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali diperoleh koefisien regresi sebesar 0.496540. Dengan tingkat signifikansi = 0.005, diperoleh nilai t sebesar 6.076682 dan signifikansi sebesar 0.000 ($p\text{-value} < 0.05$). Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi berada di bawah $\alpha = 0,05$. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis nol (H_0) dapat diabaikan, dan hipotesis alternatif (H_a) dapat diterima. Dapat diambil keputusan bahwa keluhan kesehatan berpengaruh secara signifikan kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Koefisien regresi bernilai positif sebesar 0.496540 yang artinya keluhan kesehatan berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Semakin tinggi keluhan kesehatan, maka semakin tinggi pula kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi “keluhan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali” diterima.

Dari hasil analisis regresi yang telah dilakukan, terlihat bahwa variabel keluhan kesehatan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Pengaruh keluhan kesehatan ini terjadi karena kesehatan memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas individu. Seseorang dengan masalah kesehatan yang serius mungkin tidak mampu bekerja secara efektif. Ketidakefektifan dalam pekerjaan berpotensi mengakibatkan produktivitas yang rendah. Produktivitas yang rendah berdampak pada

pendapatan yang rendah. Pendapatan yang rendah selanjutnya dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, mengakibatkan individu terjebak dalam kondisi kemiskinan.

Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

H₀ : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan penduduk terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

H_a : Ada pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan penduduk terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Hasil perhitungan secara parsial pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali diperoleh koefisien regresi sebesar 0.022784. Dengan tingkat signifikansi = 0.005, diperoleh nilai t sebesar 6.662942 dan signifikansi sebesar 0.000 ($p\text{-value} < 0.05$). Berdasarkan temuan tersebut, dapat diidentifikasi bahwa nilai signifikansi berada di bawah ambang $\alpha = 0,05$. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis nol (H₀) dapat diabaikan, sementara hipotesis alternatif (H_a) dapat diterima. Dapat diambil keputusan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh secara signifikan Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Koefisien regresi bernilai positif sebesar 0.022784 yang pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk, maka semakin tinggi pula Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, begitu pula sebaliknya. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi “pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali” diterima.

Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan, ditemukan bahwa variabel kesehatan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Oleh karena itu, dapat disarankan bahwa variabel pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Candra Mustika (2011) dan Irhamni (2017), yang juga mengindikasikan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan teori Malthus (seperti dijelaskan oleh Skuosen, 2009: 85), populasi penduduk cenderung meningkat secara geometris, sementara produksi makanan (sumber daya alam) cenderung bertambah secara aritmatika. Akibatnya, ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk yang cepat dan ketersediaan sumber daya

alam yang terbatas dapat terjadi. Diibaratkan, apabila perubahan SDA tidak dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk, maka hal ini dapat menyebabkan kemiskinan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yakni sebagai berikut. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel pengangguran, keluhan kesehatan, dan pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, Oleh karena itu, dapat disarankan bahwa untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Bali, perlu meningkatkan pengelolaan sumber daya yang ada di setiap Kabupaten/Kota, dengan tujuan agar dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan PDRB per kapita di Provinsi Bali. Dampak positif ini diharapkan akan membawa penurunan angka kemiskinan. memprioritaskan penyediaan lapangan pekerjaan, dan memberikan layanan publik atau program yang bermanfaat bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak/merata untuk mencukupi kehidupan masing-masing. Pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat dapat ditingkatkan melalui upaya sosialisasi yang diinisiasi oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan perhatian khusus terhadap penyediaan sarana dan fasilitas kesehatan yang belum merata. Untuk menekan pertumbuhan penduduk hendaknya melakukan program penyuluhan dengan mengoptimalkan pentingnya program Keluarga Berencana (KB). Program Keluarga Berencana ini juga sangat bermanfaat untuk mengurangi tingginya pertumbuhan penduduk sehingga dapat mengurangi kemiskinan.

REFERENSI

Astrini, N. M. (2013). Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 2 (8): 384-392

- Aghni nuzul Firdausy, K., Hanim, A., & Komariyah, S. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekuilibrium*, 7(1), 25-31.
- Ariansyah, t. S. (2017). Analisis pengaruh jumlah penduduk, pdrb per kapita, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten malang tahun 2001-2015. *Jurnal ilmiah mahasiswa feb*, 5(2).
- Aini, L. N., & Islamy, S. N. (2021). Dampak pengangguran, pendidikan, kesehatan, PDRB dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 1(3), 132-141.
- Badan Pusat Statistik. 2022. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa), 2017-2021. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Badan Pusat Statistik. 2022. Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (persen), 2017-2021. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Badan Pusat Statistik. 2022. PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (Ribuan Rupiah), 2017-2021. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Bintang, A. B. M., & Woyanti, N. (2018). Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (2011- 2015). *Media ekonomi dan Manajemen*, 33(1).
- Didu, S., & Fauzi, F. (2016). Pengaruh jumlah penduduk, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(1).
- Dama, Himawan Yudhistira dkk. 2016. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado (Tahun 2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 16(3): 549-561
- Fadlillah, N., Dewi, A. S., & Sukiman, S. (2016). Analisis pengaruh pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, IPM dan pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2009-2013. *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 11(1).
- Ferezagia, Debrina Vita (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*. Volume 1 Nomor 1, Juli – desember 2018 E ISSN 2622 – 1152. P ISSN 2622 - 1764
- Kuncoro, S., & Riyardi, A. (2014). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2011* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Usman, U. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* , Volume 01 Nomor 02.

- Wirawan, I. M. T., & Arka, S. (2015). Analisis pengaruh pendidikan, PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(5), 44542.
- Wiguna, Van Indra. 2013. Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.